

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah perusahaan diharapkan mampu mengelola bisnisnya di era globalisasi saat ini agar dapat bekerja dengan baik, efisien, dan menguntungkan. Selama prosedurnya perusahaan akan berusaha mengatasi sejumlah tantangan selama proses operasi, salah satunya *fraud*. Sepanjang prosesnya, ketertarikan masyarakat saat ini selaku dinamika yang mendapatkan ketertarikan dari para pengusaha. *Fraud* adalah penggunaan sumber daya perusahaan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kecurangan digunakan untuk mendapatkan peluang secara tidak jujur, sehingga pihak lain mendapatkan kerugian baik kerugian tidak langsung maupun secara langsung. Ada dua kategori kecurangan yaitu kecurangan eksternal dan kecurangan internal. Penipuan internal terjadi ketika manajer, eksekutif, atau anggota staf melakukan tindakan ilegal terhadap bisnis tempat mereka bekerja. Penipuan eksternal terjadi ketika bisnis atau entitas lain ditipu oleh orang luar, seperti ketika pelanggan menipu bisnis atau pembayar menipu wajib pajak pemerintah (Febriani and Suryandari, 2019: 33). Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengumumkan skor indeks Indonesia adalah 38 dengan skala 0-100, dan negara ini terdapat di urutan ke-96 dari 180 negara dalam hal persepsi korupsi pada tahun 2020 menurut data *Transparency International* (*International Transparency*, 2021).

Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation), Pernyataan yang palsu (Fraudulent Statement), dan Korupsi (Corruption) disebut juga dengan istilah "Fraud Tree" yang merupakan cara ACFE mengkategorikan kecurangan (Kurrohman and Widyayanti, 2018: 246). Kecurangan bisa juga termasuk dengan istilah seperti pencurian, pemerasan, dan penggelapan. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, kecurangan sering digambarkan sebagai semacam pencurian, penyerangan, atau penggelapan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menjelaskan *fraud* adalah kegiatan ilegal dengan maksud dan tujuan agar bisa menipu (seperti manipulasi atau mengarang bukti terhadap orang lain) yang dilaksanakan oleh perorangan selama di luar ataupun di dalam organisasi dengan tujuan mencapai keuntungan individu ataupun kelompok dengan mengorbankan pihak ketiga yang mendapatkan kerugian (Kurrohman and Widyayanti 2018:246). Tindakan kecurangan mungkin dapat menguntungkan pelaku, dan sudah pasti akan merusak reputasi organisasi dan bisnis serta keuangan dan moral pihak-pihak yang terlibat. Potensi seseorang untuk melakukan kecurangan biasanya disebabkan karena adanya peluang dan faktor pribadi lainnya biasanya yang menyebabkan seseorang melakukannya (Pradnyanitasari, Priliandani, and Sanjaya, 2021: 25).

Sebagai dinamika yang sering terjadi, kecurangan akuntansi telah berkembang menjadi masalah yang menarik perhatian dari seluruh penjuru dunia. Ada kecenderungan untuk *fraud*, yang diketahui dengan perilaku serta praktik yang disengaja dengan maksud ingin berbuat curang. Biasanya semacam penipuan,

mark-up, penyalahgunaan sumber daya, dan korupsi. Bahkan di tingkat bawah, kecurangan akuntansi memiliki sudah sering terjadi. Masyarakat percaya bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi ini bukan lagi rahasia karena sudah banyak kejadiannya yang banyak diberitakan di media.

Ada banyak contoh kecurangan di sebuah perusahaan di kota Batam seperti yang dilansir oleh kepri antaranews pada 16 juni 2022, yang menyiagakan tersangka sebagai GM Marketing PT Persero Batam. Sejak 2012 hingga 2021, tersangka diduga ikut serta dalam dugaan korupsi pembayaran pajak kendaraan dan alat berat PT Persero Batam. Berdasarkan tarif yang berlaku sebesar Rp 864 juta, terdapat selisih pembayaran antara Bukti Belanja Tunai PT Persero Batam dengan yang dilakukan dan diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri melalui UPTD PPD Batam Center antara tahun 2012 hingga 2021. Angka perhitungan tersebut, berdasarkan informasi akuntansi PT Persero Batam, sebesar Rp903 juta. BPR2D Kepri UPTD PPD Batam Center telah menerima selisih pembayaran alat berat sesuai tarif pajak yang berlaku dan telah menghitungnya menjadi Rp 57 juta (Antaranews, 2022).

PT Batam Shellindo Pratama menjadi subjek kasus lain, menurut tribunnews tersangka diduga mengeksploitasi posisi kekuasaannya untuk menentukan kuota rokok dan minuman beralkohol (MMEA) di BP Bintang tanpa memperhitungkan batas kewajaran. Aktivitas para tersangka menyebabkan negara menderita kerugian hingga Rp 250 miliar. Menyaksikan sejumlah contoh kecurangan di atas menunjukkan bagaimana kecurangan termasuk masalah rumit yang sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, deteksi dan pencegahan penipuan sangat penting.

Namun, untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengungkapan yang efektif, penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang motivasi dan sejarah di balik kegiatan para pelaku penipuan. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk menipu adalah salah satu cara untuk mencegahnya (Tribunnews, 2021).

Selain itu, ada sejumlah masalah pengendalian internal, seperti dilansir CNN Indonesia. Secara khusus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dengan badan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Buku Undang-Undang LHP tentang Sistem Pengendalian Internal. Banyak tanah BP Batam yang sudah direlokasi, dan menurut BPK, penerimaan negara (PNBP) yang tidak dikenakan pajak kurang ditentukan atau belum dipungut. Pendapatan negara terdampak oleh hal ini. BPK menemukan bahwa BP Batam telah membayar lebih untuk produk dan biaya modal. Hal ini terjadi akibat dari pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai dengan syarat dan kontrak. Kelebihan pembayaran belanja modal yang dilakukan BP Batam terkait pembangunan jalan, apron, dan pipa, menurut Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Achsanul Haq. Menurutnya, pemeriksaan lapangan fisik mengungkapkan bahwa alokasi pekerjaan yang berjumlah Rp 1,02 miliar tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kontrak. Selain itu, terdapat PNBP lain yang belum terkumpul atau terkumpul kurang dari yang diharapkan, antara lain yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas garbarata seharga Rp 40,2 juta dan jasa penumpukan peralatan senilai Rp 207,63 juta di Pelabuhan Batu Ampar (CNN Indonesia, 2021).

Permasalahan lainnya adalah kasus yang di informasikan oleh Kompas nasional. Di berbagai daerah terdapat penyediaan air minum (SPAM) dan saat itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengecam lemahnya pengawasan internal Kementerian PUPR. Hal tersebut disebabkan karena KPK sejauh ini menemukan adanya operasi korupsi di 20 proyek SPAM di beberapa lokasi. Terlebih, menurut Febri, tuduhan tersebut menguat ketika 16 pejabat pembuat komitmen (PPK) di sejumlah proyek SPAM menerima dana sebesar Rp 4,7 miliar. "Mungkin juga ada aliran uang di sana, menurut spekulasi. Bahwa pengendalian internal belum mampu mendeteksi dugaan anomali ini menjadi salah satu faktor, tentunya hal ini bisa terjadi" jelas dia. Akibatnya, Widiarto selaku Inspektur Jenderal Kementerian PUPR telah diperiksa oleh KPK. KPK juga melihat keterkaitan antara inisiatif kementerian dengan prosedur pengendalian internal saat itu. Kementerian PUPR dapat belajar dari contoh ini untuk meningkatkan pengendalian internal (Kompas.com, 2019).

Informasi yang diterima manajemen tidak dapat diandalkan, terlambat, tidak relevan, dan tidak lengkap adalah salah satu penyebab yang membuat tingginya tingkat *fraud* yang dilaksanakan oleh para pekerja, yang membuatnya sulit untuk membuat keputusan dan mengembangkan rencana yang baik agar tujuan organisasi terpenuhi.

Oleh sebab itu, pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi dan memberi arahan laporan akuntansi (Eko, 2019: 8). Agar pelaporan akuntansi diarahkan dan diawasi, diperlukan pengendalian internal. Pengendalian internal ini sangat penting untuk mendeteksi dan menghentikan penipuan serta menjaga

semua jenis aset organisasi, termasuk yang tidak berwujud. Sebuah perusahaan lebih cenderung membuat kesalahan dan melakukan kecurangan jika pengendalian internalnya buruk. Di sisi lain, jika pengendalian internal efektif, risiko *fraud* dapat dikurangi. Kemungkinan kecurangan dapat berkurang jika pengendalian internal kuat.

Manajemen, dewan komisaris dan pekerja lain menggunakan pengendalian internal sebagai prosedur untuk menjamin sebuah perolehan tiga kelompok tujuan berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan, dan keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan. *Fraud triangle* berpendapat bahwa dengan memperkuat pengendalian internal, risiko *fraud* dapat berkurang. Karena adanya pengendalian internal memungkinkan pemeriksaan silang pekerjaan karyawan oleh karyawan lain di dalam organisasi, keberhasilan mereka memiliki pengaruh substansial pada upaya untuk menggagalkan potensi penipuan akuntansi. Ini mengurangi kemungkinan penipuan dan mencegah kelainan yang dapat membahayakan operasi perusahaan. Pengendalian internal biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengelola operasi, melindungi aset, dan mencegah penyalahgunaan sistem. Untuk mencegah kecurangan akuntansi, pengendalian internal sangat penting. Kecurangan akuntansi lebih kecil kemungkinannya terjadi dalam bisnis dengan tingkat pengendalian internal yang lebih tinggi (Rahmi and Helmayunita, 2019: 945).

Penelitian terdahulu (Kurrohman and Widyayanti, 2018: 253) memberikan kesimpulan bahwa kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, dan ketaatan keaturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

(fraud). Sedangkan perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Natalia, Pranoto, and Asmara 2018: 54) memberikan kesimpulan Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, perilaku tidak etis berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, kesesuaian kompensasi dan perilaku tidak etis secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Dari penjabaran tersebut, maka penulis membuat judul penelitian sebagai berikut **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN AKUNTANSI DI PERUSAHAAN KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ada di penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Masih banyak kasus pemanipulasian laporan keuangan pada perusahaan sehingga berdampak pada ketidakwajaran dari retribusi daerah berdasarkan tarif yang berlaku.
2. Lemahnya pengendalian internal sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mematuhi ketentuan dan kontrak.
3. Banyaknya penyimpangan di sebuah perusahaan yang dikarenakan lemahnya pengendalian internal.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, sehingga batasan masalah di penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan perusahaan yang ada di Kota Batam
2. Peneliti mengambil sampel pada staff keuangan yang bekerja di perusahaan yang ada di Kota Batam.
3. Penelitian ini menggunakan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis, kesesuaian kompensasi.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disajikan diatas, bahwa penulis membuat rumusan masalah penelitian yakni seperti:

1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
5. Apakah keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Supaya memahami efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.
2. Supaya memahami ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Supaya memahami perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi.
4. Supaya memahami kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.
5. Supaya memahami keefektifan pengendalian internal, ketaatan akuntansi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan agar penelitian bisa bermanfaat bagi pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun praktis, seperti:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa memperbanyak wawasan serta informasi tentang dampak efektivitas pengendalian internal, kepatuhan akuntansi, perilaku tidak etis, dan kesesuaian pembayaran untuk penipuan akuntansi dalam suatu perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dalam industri perkuliahan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bisa menyampaikan masukan dan laporan tambahan kepada perusahaan terhadap dampak efektivitas pengendalian internal, kepatuhan akuntansi, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi.

2. Bagi Penulis

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bisa membantu pemahaman penulis terhadap dampak efektivitas pengendalian internal, ketaatan akuntansi, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi atas kecurangan akuntansi.

3. Bagi Akademis

Diharapkan agar penelitian ini bisa memajukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi. Untuk menambahkan informasi dan ide-ide penting, penelitian ini dapat ditingkatkan di masa depan.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi individu yang berencana untuk melakukan penelitian yang sebanding di masa depan, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan.